

RETRIBUSI - PENETAPAN

Perda Kab. Garut No. 5 Tahun 2001

PERATURAN DAERAH KAB. GARUT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

- ABSTRAK** : - Bahwa Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan penataan sistem transportasi terpadu dengan memperhatikan ketertiban dan permintaan orang terhadap jasa transportasi, melalui pengaturan Izin Trayek di Wilayah Kabupaten Garut. Hal ini dilakukan dalam upaya penyelenggaraan transportasi jalan yang aman, cepat, lancar dan teratur serta mampu memadukan roda transportasi lainnya. Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum.
- Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 49 Prp Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 13 Tahun 1980, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 14 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 41 Tahun 1993, PP No. 42 Tahun 1993, PP No. 44 Tahun 1993, PP No. 20 Tahun 1997; PP No. 25 Tahun 2000, Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Daerah Tingkat II Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kab. Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 26 Tahun 2000; Perda Kab. Garut No. 27 Tahun 2000.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Garut, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum

2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
6. Struktur dan Besarnya Tarif
7. Tempat Pemungutan, Masa Retribusi dan Tata Cara Pemungutan
8. Tata Cara Penagihan
9. Keberatan
10. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
11. Sanksi Administrasi
12. Ketentuan Pidana
13. Penyidikan
14. Ketentuan Peralihan
15. Ketentuan Lain dan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Garut disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- Diundangkan pada tanggal 22 Juni 2001.